

**IDENTIFIKASI POHON KINERJA BIRO ORGANISASI SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROSES	INDIKATOR																																						
I	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richtizing)	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Tertanganinya permasalahan kelembagaan di OPD provinsi	Persentase OPD provinsi yang permasalahan kelembagaan dapat tertangani dengan baik	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan perangkat daerah Provinsi	Jumlah OPD Provinsi yang dibina	Terselenggaranya rapat koordinasi perangkat daerah provinsi	Jumlah OPD yang mengikuti rapat koordinasi																																						
									Terselenggaranya sosialisasi pembentukan perangkat daerah	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi																																						
									Tersusunnya dokumen tugas dan fungsi UPT dan cabang dinas	Jumlah dokumen UPT dan cabang dinas yang tersusun																																						
									Tersusunnya SOTK	Jumlah dokumen SOTK OPD																																						
									Terselenggaranya rapat koordinasi perangkat daerah kab/kota	Jumlah kab/kota yang mengikuti rapat koordinasi																																						
									Terselenggaranya sosialisasi pembentukan perangkat daerah OPD kab/kota	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi																																						
									Tersusunnya rekomendasi pembentukan UPT kab/kota	Jumlah rekomendasi Gubernur terkait pembentukan UPT kab/kota																																						
									Tersusunnya rekomendasi perubahan Perda kab/kota	Jumlah rekomendasi Gubernur terkait perubahan Perda kab/kota																																						
									Termanfaatkannya dokumen analisis jabatan dalam pemenuhan kebutuhan sesuai kompetensi pegawai	Persentase pemanfaatan dokumen analisis jabatan dalam pemenuhan kebutuhan sesuai kompetensi pegawai	Terpenuhinya dokumen analisis jabatan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai kompetensi	Persentase pemenuhan dokumen analisis jabatan yang disusun	Tersusunnya dokumen Anjab	Persentase OPD yang telah memiliki data analisis jabatan (fungsional)	Bimbingan teknis	Jumlah peserta Bimtek penyusunan analisis jabatan	Pengumpulan data jabatan	Jumlah OPD yang dilakukan pengumpulan data																														
																Pelaporan Anjab ke dalam sistem elektronik		Jumlah informasi jabatan yang disampaikan ke pihak terkait	Jumlah data OPD yang dilakukan pengolahan	Jumlah data jabatan																												
			Bimbingan teknis	Jumlah peserta Bimtek penyusunan analisis jabatan	Pengumpulan data jabatan	Jumlah OPD yang dilakukan pengumpulan data																																										
							Pengolahan data jabatan	Jumlah data OPD yang dilakukan pengolahan													Jumlah data jabatan																											
																						Analisis data jabatan	Jumlah data jabatan																									
																								Bimbingan teknis	Jumlah peserta Bimtek penyusunan analisis jabatan	Pengumpulan data jabatan	Jumlah OPD yang dilakukan pengumpulan data																					
																												Pengolahan data jabatan	Jumlah data OPD yang dilakukan pengolahan	Jumlah data jabatan																		
																															Analisis data jabatan	Jumlah data jabatan																
																																	Bimbingan teknis	Jumlah peserta Bimtek penyusunan analisis jabatan	Pengumpulan data jabatan	Jumlah OPD yang dilakukan pengumpulan data												
																																					Pengolahan data jabatan	Jumlah data OPD yang dilakukan pengolahan	Jumlah data jabatan									
																																								Analisis data jabatan	Jumlah data jabatan							
																																										Bimbingan teknis	Jumlah peserta Bimtek penyusunan analisis jabatan	Pengumpulan data jabatan	Jumlah OPD yang dilakukan pengumpulan data			
																																														Pengolahan data jabatan	Jumlah data OPD yang dilakukan pengolahan	Jumlah data jabatan
									Bimbingan teknis	Jumlah peserta Bimtek penyusunan analisis jabatan	Pengumpulan data jabatan	Jumlah OPD yang dilakukan pengumpulan data																																				
													Pengolahan data jabatan	Jumlah data OPD yang dilakukan pengolahan	Jumlah data jabatan																																	
Analisis data jabatan	Jumlah data jabatan																																															

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Papua	Nilai SAKIP Provinsi Papua	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Provinsi Papua	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Papua yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat Daerah Provinsi Papua	Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Aspek Perencanaan	Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja Perangkat Daerah Provinsi Papua secara baik	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Papua yang memiliki Perjanjian Kinerja secara baik	Pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Papua	Jumlah OPD Provinsi Papua yang dilakukan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja
					Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Perangkat Daerah Provinsi Papua	Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Aspek Perencanaan	Tersusunnya dokumen Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Papua secara baik	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki Indikator Kinerja Utama yang baik	Pendampingan penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Papua	Jumlah OPD Provinsi Papua yang dilakukan pendampingan penyusunan Indikator Kinerja Utama
					Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Perangkat Daerah Provinsi Papua	Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Aspek Pelaporan Kinerja	Tersusunnya dokumen laporan kinerja (LKj) Perangkat Daerah Provinsi Papua sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah menyusun LKj/LKIP sesuai ketentuan perundang-undangan	Pendampingan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Provinsi Papua	Jumlah OPD Provinsi Papua yang dilakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Persentase Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Rata-Rata Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada Aspek Perencanaan	Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua secara baik	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang memiliki Perjanjian Kinerja secara baik	Pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang dilakukan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja
					Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Rata-Rata Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada Aspek Perencanaan	Tersusunnya dokumen Indikator Kinerja Utama Kabupaten/Kota di Provinsi Papua secara baik	Persentase Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang memiliki Indikator Kinerja Utama yang baik	Pendampingan penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang dilakukan pendampingan penyusunan Indikator Kinerja Utama
					Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Rata-Rata Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada Aspek Pelaporan Kinerja	Tersusunnya dokumen laporan kinerja (LKj) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang telah menyusun LKj/LKIP sesuai ketentuan perundang-undangan	Pendampingan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang dilakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
		Nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Papua	Persentase OPD Provinsi yang memperoleh nilai RB minimal B	Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah Provinsi Papua dalam melaporkan pelaksanaan RB	Persentase OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaporkan pelaksanaan RB melalui PMPRB secara tepat waktu	Meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Papua	Persentase OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang laporan pelaksanaan RB sesuai ketentuan perundang-undangan	Pendampingan penyusunan laporan pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah Provinsi Papua	Jumlah perangkat daerah Provinsi Papua yang dilakukan pendampingan pelaporan pelaksanaan RB
			Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh nilai RB minimal B	Meningkatnya ketaatan Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan/melaporkan pelaksanaan RB	Persentase Kab/Kota se Papua yang melaporkan pelaksanaan RB Pemda secara tepat waktu	Meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Persentase Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang laporan pelaksanaan RB sesuai ketentuan perundang-undangan	Pendampingan penyusunan laporan pelaksanaan RB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang dilakukan pendampingan pelaporan pelaksanaan RB

3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua	Nilai layanan publik Pemerintah Provinsi Papua	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah Provinsi Papua	(1) Persentase Perangkat Daerah Provinsi Papua yang mendapatkan penilaian baik atas standar pelaksanaan pelayanan publik (SPP)  (2) Persentase Unit Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah di Provinsi Papua yang memperoleh nilai survei IKM kategori baik	Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan Standar Pelayanan Publik secara baik	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) secara baik	Ditetapkannya dokumen pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan	Pendampingan penyusunan standar pelaksanaan publik pada Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah Provinsi Papua yang dilakukan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik		
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Papua yang telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai ketentuan yang berlaku	Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik oleh Perangkat Daerah Provinsi Papua sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Papua yang melakukan Forum Konsultasi Publik	Fasilitasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Forum Konsultasi Publik yang difasilitasi		
					Meningkatnya kualitas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan yang berlaku	Terselenggaranya Survei Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah OPD yang telah melakukan survei kepuasan masyarakat	Pendampingan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan		
					Meningkatnya kualitas dokumen tata laksana pemerintahan	Persentase ketersediaan dokumen tata laksana pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tersusunnya dokumen SOP	Jumlah dokumen SOP	Koordinasi penyusunan SOP	Jumlah Koordinasi		
							Tersusunnya Probis	Jumlah Probis	Koordinasi penyusunan Probis	Jumlah Koordinasi		
							Tersusunnya tata naskah dinas	Jumlah tata naskah dinas	Koordinasi penyusunan tata naskah dinas	Jumlah Koordinasi		
							Tersusunnya dokumen tata pakaian dinas	Jumlah dokumen tata pakaian dinas	Koordinasi penyusunan dokumen tata pakaian dinas	Jumlah Koordinasi		
							Tersusunnya dokumen sarana dan prasarana	Jumlah dokumen sarana dan prasarana	Koordinasi penyusunan dokumen sarana dan prasarana	Jumlah Koordinasi		
							Tersusunnya dokumen budaya kerja	Jumlah dokumen budaya kerja	Koordinasi penyusunan dokumen budaya kerja	Jumlah Koordinasi		
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Nilai Layanan publik Kab/Kota se Papua	Meningkatnya ketaatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam melaksanakan Standar Pelayanan Publik secara baik	Persentase Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang telah melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) secara baik	Meningkatnya Kabupaten/Kota Provinsi Papua dalam menyusun dokumen pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Standar Pelayanan Publik sesuai ketentuan yang berlaku	Pendampingan penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Kabupaten/Kota Provinsi Papua		Persentase Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatnya Kabupaten/Kota Provinsi Papua yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang melakukan Forum Konsultasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku	Pendampingan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan	
					Meningkatnya kualitas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten/Kota Provinsi Papua		Persentase Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatnya ketaatan Kabupaten/Kota Provinsi Papua dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang telah melakukan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku	Pendampingan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan	

Jayapura, 30 Maret 2023

KEPALA BIRO,  
  
LINDA SOMBALA, S.Sos.MM  
PEMBINA TK.1  
NIP. 19720911 199112 2 001

